



Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Anggita Kurniawati Dewi^{1*}, Diva Varella Firanika², Putri N.M Nababan³, Keni Siahaan⁴, Regina Hanna Noisy⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Korespondensi penulis: 63220203@bsi.ac.id

Abstract: *This study discusses a comparison between the budget and the realization of revenue and expenditure in village governments in Central Java Province for the years 2022–2023. The background of this research lies in the crucial role of village finance in supporting regional autonomy and development at the local level. The main objective is to evaluate financial management performance through the analysis of financial ratios, such as revenue growth, expenditure growth, locally generated revenue (PAD), effectiveness, efficiency, and fiscal independence. The method used is descriptive quantitative analysis based on data from the Budget Realization Report (LRA). The findings show that 2023 experienced improvements compared to 2022, as indicated by increases in revenue, expenditure, and PAD. However, effectiveness slightly declined, and efficiency showed signs of budget inefficiency. The level of village fiscal independence also increased, although it has not yet reached full autonomy. These findings indicate that although the direction of village financial management has improved, a comprehensive evaluation of budget effectiveness and efficiency is still necessary. Therefore, village governments need to strengthen their planning and financial control strategies to ensure more optimal, accountable, and sustainable fund utilization.*

Keywords: *Budget Effectiveness; Budget Efficiency; Financial Ratios; Fiscal Independence; Village Government Finance*

Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2023. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran keuangan desa dalam mendukung otonomi daerah dan pembangunan di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan melalui analisis rasio keuangan, seperti pertumbuhan pendapatan, belanja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2023 mengalami perbaikan dibandingkan 2022, ditandai dengan peningkatan pendapatan, belanja, dan PAD. Namun, efektivitas mengalami sedikit penurunan dan efisiensi menunjukkan adanya pemborosan anggaran. Tingkat kemandirian desa juga meningkat, meskipun masih tergolong belum mandiri sepenuhnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun arah pengelolaan keuangan desa membaik, masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Implikasinya, pemerintah desa perlu memperkuat strategi perencanaan dan pengendalian keuangan agar penggunaan dana menjadi lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Anggaran; Efisiensi Anggaran; Rasio Keuangan; Kemandirian Fiskal; Keuangan Pemerintah Desa

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan luas untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan secara mandiri. Salah satu bentuk nyata dari otonomi tersebut adalah pengelolaan keuangan desa. Tujuannya tidak hanya untuk mendukung pembangunan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, anggaran dan realisasi pendapatan serta

belanja desa menjadi indikator penting dalam mengukur seberapa efektif dan efisien desa dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki.

Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki lebih dari 7.000 desa dengan kondisi yang sangat bervariasi, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri. Pemerintah Provinsi terus mendorong peningkatan kinerja desa melalui penyaluran dana dan program pembinaan. Namun, sejauh mana hal ini berdampak terhadap realisasi anggaran dan peningkatan kemandirian fiskal masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian empiris. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang tercapai juga sering menjadi sorotan. Ketika realisasi jauh di bawah anggaran, hal ini bisa menunjukkan lemahnya pelaksanaan program. Sebaliknya, realisasi yang melampaui anggaran bisa menjadi tanda pemborosan atau perencanaan yang tidak akurat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti kinerja keuangan pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, kajian yang secara khusus membahas realisasi pendapatan dan belanja desa dari tahun ke tahun masih terbatas. Padahal, pendekatan melalui rasio keuangan seperti pertumbuhan pendapatan, belanja, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap dana desa, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pun semakin tinggi. Pemerintah pusat mendorong peningkatan kapasitas desa melalui pelatihan dan sistem pelaporan digital. Sayangnya, belum semua desa mampu menjalankan fungsi ini secara optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya perencanaan, dan minimnya pengawasan menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang objektif untuk menilai sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan desa sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 dan 2023. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung rasio-rasio keuangan untuk melihat tren dan perubahan dari tahun ke tahun. Temuan awal menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan belanja, namun efektivitas justru menurun, dan efisiensi melebihi batas ideal yang menandakan pemborosan. Kemandirian fiskal mengalami kenaikan, tetapi masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan masukan konkret bagi pemerintah desa dan daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, efisien, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung otonomi desa (mardiasmo 2020). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan melalui keseimbangan antara anggaran dan realisasi yang dicapai (Ketut Siti Ardianti and Aristia Prayudi n.d.).

Anggaran merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, sedangkan realisasi menunjukkan kinerja aktual dari perencanaan tersebut. Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dapat mencerminkan lemahnya perencanaan atau pelaksanaan program desa. menurut (Febriana and Narastri 2023) Untuk itu, penting dilakukan pengukuran kinerja keuangan melalui berbagai indikator rasio.

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan yang direncanakan berhasil direalisasikan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka semakin baik pula kinerja penerimaan keuangan desa (Andi Nurwana n.d.). Sementara itu, rasio efisiensi anggaran menggambarkan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input atau biaya yang digunakan. Belanja desa yang efisien mencerminkan kemampuan menghasilkan output maksimal dengan input minimal. Pandangan mengenai efisiensi menyatakan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara hasil produksi dan sumber daya yang digunakan, serta dapat diukur melalui perbandingan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (Zannah, Nasution, and Lubis 2024).

Pertumbuhan pendapatan dan belanja desa juga menjadi indikator penting untuk mengukur dinamika keuangan daerah. Kenaikan pada kedua aspek tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal dan aktivitas pembangunan (Fatimah and Deviani 2024). Salah satu sumber pendapatan utama desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes), yang merupakan indikator dari tingkat kemandirian ekonomi desa. PADes bersumber dari retribusi, hasil kekayaan desa, dan usaha milik desa yang menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan potensi lokal (Bin Abdullah 2021).

Tingkat kemandirian fiskal desa menurut (Ica Maulidna n.d.) dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan. Semakin tinggi rasio ini, semakin mandiri suatu desa dalam pembiayaan operasionalnya tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Rizka Nur Rahmawati, 2024). Sebaliknya, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang tinggi menunjukkan kerentanan fiskal terhadap kebijakan pusat, (Rizka Nur Rahmawati 2024).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi sumber utama dalam mengevaluasi pencapaian anggaran dan efisiensi pelaksanaannya (Cellya,2024). Dalam konteks ini, tata kelola keuangan desa yang baik harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat (Susano and Rachmawati 2024). Evaluasi kinerja keuangan desa sangat penting untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan (Atikah et al. 2021). Akuntabilitas dalam pelaporan dan penggunaan dana desa juga krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan (Mais et al. 2024).

Saat ini, sistem pelaporan berbasis digital mulai digunakan oleh banyak desa untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan. Namun, implementasinya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia (Puspitawati, Cahyani, and Hertati 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa yang efektif memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Fadliyati and Sjarlis n.d.) Pengukuran kinerja anggaran desa tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada pencapaian output pembangunan yang direncanakan (Bokiun and Lukum 2023).

Dalam pelaksanaannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap anggaran dan realisasinya agar tetap berada dalam koridor hukum dan kebutuhan masyarakat (Pratama, Badaruddin, and Kadir 2021). Di samping itu, kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan desa menjadi faktor penentu utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel (Kompetensi SDM et al. 2021).

Untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih sistematis dan efisien, pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes membantu mempercepat dan mempermudah proses perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Arianto and Kahpi 2020).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan perbandingan untuk melihat perbedaan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja desa di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Analisis dilakukan dengan menghitung beberapa rasio keuangan, seperti pertumbuhan pendapatan,

pertumbuhan belanja, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas, efisiensi, dan tingkat kemandirian fiskal. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana desa mampu mengelola keuangannya secara efektif dan mandiri. Dengan pendekatan ini, hasil analisis dapat memberikan gambaran nyata tentang kinerja pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan tata kelola anggaran ke depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023 sebagai dasar analisis kinerja keuangan daerah (pemerintah Jateng n.d.). Data disusun dalam bentuk tabel agar memudahkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai. Analisis dilakukan terhadap komponen pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, serta rasio-rasio keuangan penting guna menilai efektivitas, efisiensi, dan tingkat kemandirian fiskal daerah. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

No	Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Presentase (%)
A.	Pendapatan	24.129.013.356.000	24.167.935.634.127	100,16
1	Pendapatan Asli Daerah	16.141.754.406.000	16.264.618.853.852	100,76
2	Pendapatan Transfer	7.894.603.950.000	7.810.882.578.787	96,94
3	Lain lain Pendapatan daerah sah	92.655.000.000	92.434.201.488	99,76
B.	Belanja	25.147.706.241.000	23.950.240.500.405	95,24
1	Belanja Operasi	14.233.669.493.000	13.456.887.674.949	94,54
2	Belanja Modal	2.015.151.410.000	1.713.641.630.081	85,04
3	Belanja Tak terduga	36.000.000.000	16.545.479.100	45,96
4	Belanja Transfer	8.862.885.338.000	8.763.165.716.275	96,87
	Surplus/Defisit	- 1.018.692.885.000	217.695.136.722	- 21,37

Sumber: LRA pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2022, total pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp24,13 triliun dan berhasil direalisasikan sebesar Rp24,17 triliun, atau 100,16% dari target. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan secara baik, bahkan sedikit melampaui target. Penerimaan tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi 100,76%, menandakan potensi daerah tergarap dengan cukup maksimal. Namun,

pendapatan transfer hanya terealisasi 96,94%, yang berarti belum seluruh dana dari pusat atau pemerintah lain bisa dicairkan atau dimanfaatkan tepat waktu.

Dari sisi belanja, total anggaran sebesar Rp25,14 triliun namun hanya direalisasikan Rp23,95 triliun, atau sekitar 95,24%. Artinya, ada sejumlah anggaran yang tidak terserap, bisa jadi karena keterlambatan pelaksanaan program, efisiensi, atau ketidaksesuaian target pelaksanaan. Belanja operasi dan modal pun belum sepenuhnya maksimal—belanja modal hanya tercapai 85,04%, mengindikasikan masih rendahnya penyerapan untuk pembangunan fisik atau aset jangka panjang. Belanja tak terduga juga rendah (45,96%), yang kemungkinan karena minimnya kejadian luar biasa seperti bencana atau keadaan darurat.

Menariknya, meskipun direncanakan mengalami defisit sebesar Rp1,01 triliun, realisasi justru menunjukkan surplus Rp217 miliar. Ini menunjukkan kemampuan menekan pengeluaran atau meningkatnya pendapatan melebihi perkiraan. Namun, kondisi ini juga perlu ditinjau lebih lanjut karena surplus bisa disebabkan oleh belanja yang tidak maksimal, bukan efisiensi yang benar-benar direncanakan.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

No	Keterangan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Presentase (%)
A.	Pendapatan	26.222.145.305.000	25.369.733.556.675	96,75
1	Pendapatan Asli Daerah	17.922.953.192.000	17.012.509.421.006	94,92
2	Pendapatan Tranfer	8.219.885.331.000	8.278.928.086.424	100,72
3	Lain lain Pendapatan daerah sah	79.306.782.000	78.296.049.245	98,73
B.	Belanja	27.482.744.908.000	25.800.341.207.782	93,88
1	Belanja Operasi	15.683.378.371.000	14.887.780.012.763	94,93
2	Belanja Modal	1.973.645.351.000	1.794.862.778.298	90,94
3	Belanja Tak terduga	25.000.000.000	740.000.000	2,96
4	Belanja Tranfer	9.800.721.186.000	9.116.958.416.721	93,02
	Surplus/Difisit	- 1.260.599.603.000	- 430.607.651.107	34,16

Sumber: LRA pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2023, target pendapatan naik menjadi Rp26,22 triliun, namun realisasi justru turun menjadi Rp25,37 triliun (96,75%). Ini menunjukkan penurunan efektivitas dalam mencapai target, kemungkinan karena perencanaan terlalu optimistis atau dampak ekonomi eksternal yang menurunkan pemasukan daerah. PAD pun mengalami penurunan dari sisi persentase menjadi 94,92%, mengindikasikan bahwa sumber-sumber pendapatan lokal kurang tergarap secara optimal dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, pendapatan transfer justru meningkat tajam dengan realisasi 100,72%, menunjukkan peningkatan dukungan dari pemerintah pusat atau kelancaran penyaluran dana antar pemerintahan.

Dari sisi belanja, target meningkat menjadi Rp27,48 triliun, namun realisasi hanya Rp25,80 triliun (93,88%). Ini berarti kinerja penyerapan belanja sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Belanja operasi tetap stabil (94,93%), tetapi belanja modal naik menjadi 90,94%, menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Namun yang cukup mencolok adalah belanja tak terduga yang hanya 2,96% dari anggaran, sangat rendah dibanding tahun sebelumnya. Ini bisa berarti tidak adanya kebutuhan darurat atau terlalu tingginya anggaran cadangan yang tidak relevan dengan kebutuhan.

Berbeda dari tahun 2022 yang berakhir surplus, tahun 2023 tetap defisit sesuai rencana, tetapi besarnya defisit menurun dari target awal Rp1,26 triliun menjadi hanya Rp430 miliar. Artinya, kendali anggaran mulai membaik, meskipun tantangan dalam mengoptimalkan pendapatan dan efisiensi belanja tetap ada.

Tabel 3. Perbandingan Rasio Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Antara Tahun 2022 dan 2023.

Rasio	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Pertumbuhan Pendapatan	-11%	8,68%	Peningkatan pendapatan
Pertumbuhan Belanja	-9%	9,29%	Peningkatan belanja
Pertumbuhan PAD	10%	11,03%	Tren positif
Efektivitas	100,16%	96,75%	Sedikit di bawah target
Efisiensi	99,10%	101,70%	Pemborosan
Kemandirian	66,88%	68,34%	Peningkatan kemandirian fiskal

Sumber: Data diolah penulis (2025).

Pada tahun 2022, pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar 11%, namun berhasil membaik di tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 8,68%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan perbaikan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Pertumbuhan belanja juga mengalami pergeseran positif, dari penurunan 9% pada tahun 2022 menjadi kenaikan 9,29% di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan belanja, baik untuk pembangunan maupun operasional, berjalan lebih aktif dan menyerap anggaran lebih besar. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan dari 10% menjadi 11,03%, menandakan bahwa daerah semakin mampu menggali potensi pendapatan lokal.

Namun, tidak semua indikator menunjukkan hasil yang positif. Rasio efektivitas mengalami penurunan dari 100,16% di tahun 2022 menjadi 96,75% di tahun 2023. Artinya, meskipun pendapatan meningkat, realisasi terhadap target anggaran sedikit menurun. Rasio

efisiensi justru mengalami lonjakan dari 99,10% menjadi 101,70%, yang menandakan adanya penggunaan anggaran yang melebihi pendapatan, atau dengan kata lain, terjadi pemborosan. Hal ini menjadi catatan penting karena efisiensi yang menurun bisa berdampak pada stabilitas fiskal di masa mendatang. Meski begitu, rasio kemandirian fiskal mengalami peningkatan dari 66,88% menjadi 68,34%, yang menunjukkan bahwa daerah mulai bergerak ke arah yang lebih mandiri dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan dalam pertumbuhan dan kemandirian, masih diperlukan pengawasan dan perbaikan dalam aspek efektivitas dan efisiensi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022–2023 mengalami perbaikan, terutama dari sisi pertumbuhan pendapatan, belanja, dan PAD. Namun, efektivitas mengalami penurunan, dan efisiensi menunjukkan adanya pemborosan, yang berarti penggunaan anggaran belum sepenuhnya optimal. Kemandirian fiskal daerah juga mengalami peningkatan meskipun belum signifikan, sehingga ketergantungan pada dana transfer masih cukup tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam perencanaan dan pengendalian anggaran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat perencanaan yang berbasis data, meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, serta memperbaiki sistem pengawasan internal. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data agregat provinsi, sehingga penelitian lanjutan disarankan mengkaji secara lebih mendalam di tingkat desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik dan akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, P. (2018). *Human resource management theory and application*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Nurwana. (n.d.). *Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor desa Leppangeng Kabupaten Bone*.
- Arianto, A., & Ashabul Kahpi. (2020). *Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)*. Vol. 2.
- Atikah, S., Rakhmawati, I., Rosyida, B., Astuti, D., Tialurra, D., & Nabilla, D. (2021). *Evaluasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)*. Vol. 5.
- Bin Abdullah, H. (2021). "Implementasi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDesa) Jatimakmur dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes) di desa Jatirejoyoso."

- Journal of Governance Innovation*, 3(2), 204–22.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i2.810>
- Bokiu, Z., & Lukum, A. (2023). “SEIKO: Journal of Management & Business. Analisis kinerja anggaran dengan metode value for money dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.” *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 194–203.
- Cellya. (n.d.). *Analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Medan*.
- Fadliyati, D., & Sjarlis, S. (n.d.). *Pengaruh alokasi dana desa, belanja desa*. Volume 2 Nomor 2.
- Fatimah, I., Maulidna, I., & Deviani, D. (2024). “Pengaruh alokasi dana desa (ADD) terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.” *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 314–31.
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.876>
- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). “Analisis laporan realisasi anggaran (LRA) untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Surabaya).” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 160–73.
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v1i3>.
- Ica Maulidna. (n.d.). *Pengaruh dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Mandailing Natal: Analisis menggunakan metode geographically weighted regression (GWR)*.
- Ketut Siti Ardianti, N., & Prayudi, M. A. (n.d.). *Determinan kualitas laporan keuangan koperasi pegawai negeri: Pengujian peran moderasi tingkat penerapan sistem pengendalian internal*. Vol. 9.
- Komunitas SDM, Pengaruh, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Suwawa Selatan Sahmin Noholo, M. Z. Hippy, K. Kunci, & Aset Pengelolaan Keuangan Desa. (2021). “Jambura Accounting Review.” *Jambura Accounting Review*, 2(1), 66–75.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). “Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.” *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140.
<https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Mardiasmo. (2020). *Karakteristik dan lingkungan sektor publik*.
- Pemerintah Jateng. (n.d.). *LRA_2023*.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). “Peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan dana desa.” *PERSPEKTIF*, 10(2), 371–82.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Puspitawati, L., Cahyani, N., & Hertati, L. (2023). “Peningkatan tata kelola keuangan agrowisata desa Cimande melalui digitalisasi bisnis.” *Jurnal Abdimas Mandiri*, 6(3).
<https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2708>
- Rizka Nur Rahmawati, H. E. Pratiwi, M. Lisniwati, L. Dwi Afriani, A. Kharisma Haryadi. (2024). “Pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah, DAK, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.” *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 115–26.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.492>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). “Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530 2) Bisnis manajemen retail.” *Universitas Ngudi Waluyo Jl. Diponegoro No 12(1)*, 50512.

Zannah, I., Samri, Y., Juliati Nasution, & Lubis, A. W. (2024). “Akuntabilitas efisiensi dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa Silumajang tahun 2022.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 7(1), 193–202. <https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6685>